

## KEBANGKITAN JEPANG PASCA PENDUDUKAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 1952-1964

Teguh Prasetyo, Sri Handayani, Sumardi.

Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: umamahnurul@ymail.com

### ABSTRAK

Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang pernah mengalami kehancuran pada akhir Perang Pasifik. Kebangkitan Jepang didorong oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam terdiri dari karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Jepang. Faktor dari luar terdiri dari pendudukan Amerika Serikat dan munculnya Perang Korea yang menguntungkan Jepang. Keberhasilan proses kebangkitan, didasari oleh kecermatan bangsa Jepang dalam memanfaatkan peluang dan kemampuan untuk menirukan bangsa lain untuk memproduksi barang-barang yang berkualitas. Hasil akhir dari proses kebangkitan nasional adalah munculnya Jepang sebagai negara maju dan modern, diterimanya kembali Jepang dalam politik global, masuknya Jepang sebagai negara donatur, dan munculnya sistem pertahanan yang dapat mendukung terciptanya perdamaian internasional. Proses kebangkitan Jepang berjalan dengan cepat dan bertahan lama, hal ini tidak dapat dicapai oleh bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan penelitian ini menarik untuk dilaksanakan, mengingat kebangkitan Jepang dapat digunakan sebagai contoh untuk pembangunan nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) faktor-faktor apa saja yang mendorong kebangkitan Jepang setelah pendudukan Amerika Serikat, (2) bagaimanakah usaha Jepang untuk memajukan negaranya setelah memperoleh kembali kedaulatan tahun 1952-1964, (3) bagaimanakah hasil yang dicapai Jepang pada masa kebangkitan. Tujuan penelitian adalah; (1) untuk menganalisis faktor-faktor pendorong lahirnya kebangkitan Jepang setelah pendudukan Amerika Serikat; (2) untuk menganalisis usaha Jepang untuk memajukan negaranya setelah memperoleh kembali kedaulatan tahun 1952-1964; (3) untuk menganalisis hasil yang dicapai Jepang pada masa kebangkitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Kesimpulan penelitian bahwa kebangkitan Jepang didorong oleh adanya faktor intern dan faktor ekstern. Usaha Jepang untuk menjadi negara maju difokuskan pada bidang ekonomi, politik, dan militer. Hasil yang dicapai Jepang selama masa kebangkitan dapat dilihat dari bidang ekonomi, politik, militer, dan sosial.

Kata Kunci: kebangkitan Jepang, pendudukan Amerika Serikat

### ABSTRACT

Japan of East Asian countries that have terrific experience at the end of Pacific War. The rising of Japan was caused by both internal and external. The other factor was character of Japan people and their ancient values. Eksternal factors consists of United States commanded and Korea War that gives advantages for Japan. This successful rawakening based on Japan perservering on utilize the chances and ability to simulate other countries for producing qualified goods. The final result of Japan anational wakening was emergence of Japan as progressive and modern country, as Japan accepted on global politics system, the entrance of Japan as a donor country, and the emergence of defense system that could support Japan awakening after got back their authority for United States. Japanese revival process running quickly and survive long enough, this can not be achieved by other nations. Such conditions lead to this interesting research to be implemented, given the rise of Japan can be used as an example for national development. The issues of this reseach are: (1) what are the factors that drive Japan awakening after United Stated authority; (2) how did Japan gain the advance after got back their authorityperiode 1952-1964; (3) how did the result of Japan awakening. The purpose of this reseach are; (1) to analiyse factors that drive Japan awakening after United Staates authority; (2) to analyse Japan gain the advance after got back their authority periode 1952-1964; (3) to analyse the effort of Japan awakening. The method that used by this reseach is his reseach method. This method investigate and analyse critically the records and events on the past. The conclude of this research is that Japan awakening supported by intern and extern factor. Japan's effort to be a progressive country had been focused to economy, politics, and military system. The result of Japan wakening during the periode of raising could be seen at economics, politics, military, and social.

**Keywords:** *the rise of Japan, occupation United States.*

## A. PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Amerika Serikat mengakhiri perlawanan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tahun 1945 Jepang memasuki periode pendudukan Amerika Serikat (Dasuki, 1963: 58-62). Kaisar Hirohito menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Menyerahnya Kaisar Hirohito menjadi tanda berakhirnya Perang Pasifik dan runtuhnya sistem monarki di Jepang.

Pendudukan Amerika Serikat di Jepang terjadi pada tahun 1945-1952. Kebijakan Amerika Serikat di Jepang selama masa pendudukan antara lain; (1) menghancurkan militer yang menjadi penyebab perang, (2) mengadili penjahat-penjahat perang, (3) membersihkan para pemimpin yang terbukti bertanggung jawab atas politik agresi, (4) pembayaran ganti rugi perang, (5) penghancuran industri perang dan perampasan alat-alat perang, (6) pendemokrasian politik, ekonomi, dan pendidikan. Garis besar tugas pemerintah pendudukan tersebut menambah kesengsaraan Jepang, akibatnya muncul permasalahan-permasalahan dan kekacauan dalam berbagai bidang (Dasuki, 1963: 63). Permasalahan di Jepang tersebut baru teratasi setelah munculnya Perang Korea.

Peristiwa Perang Korea tahun 1950-1953 merupakan titik balik bagi Amerika Serikat untuk mengubah kebijakan di Jepang. Jepang menjadi negara penyedia barang-barang yang dibutuhkan Amerika Serikat untuk Perang Korea. Perang Korea menyebabkan perubahan penting pada tujuan kebijakan SCAP (*Supreme Command for the Allied Powers*) yang sebelumnya fokus pada program demiliterisasi berbuah menjadi program reindustrialisasi (Tjeng, 1983: 363). Perang Korea juga mempercepat proses pengembalian kedaulatan Jepang dari Amerika Serikat.

Janji kemerdekaan dari Amerika Serikat terbukti dengan lahirnya perjanjian damai *San Fransisco* tanggal 8 September 1951 yang disepakati oleh 56 negara. Perjanjian Damai *San Fransisco* mulai berlaku pada tanggal 28 April 1952, dan sejak saat itu Jepang secara resmi mendapatkan kembali kedaulatannya sebagai negara (Rosidi, 1981:23). Jepang mulai memperbaiki sistem pemerintahan yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan memprioritaskan hubungan harmonis antar bangsa.

Yoshida Shigeru dipilih sebagai Perdana Menteri Jepang yang pertama dalam pemilihan umum tahun 1952. Jepang selama pemerintahan Yoshida Shigeru (1946-1954.) menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan politik. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh PM Yoshida mencakup orientasi pembangunan dibidang ekonomi dan pertahanan dalam taraf yang minimum (Reischauer & Craig, 1978: 302-303). Pelaksanaan *doctrine Yoshida* tersebut diimplementasikan dalam pembangunan industri sesuai dengan kebutuhan pasar global dan kebijakan luar negeri cinta damai dengan negara-negara lain. *Doctrine Yoshida* tetap dipertahankan oleh PM. Kishi Nobusuke (1957-1960) dan PM Ikeda Hayato (1960-1964) sebagai acuan dalam pembangunan Jepang.

Pada tahun 1960-1965, Jepang memasuki periode pertumbuhan yang pesat. Infrastruktur ekonomi secara aktif mulai dikembangkan untuk mendukung industri yang dijalankan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap keseimbangan dalam sistem pemerintahan Jepang. Partai-partai politik membentuk koalisi untuk meredam konflik antar elemen dalam pemerintahan (Reischauer, 1964: 235-237). Munculnya pengaruh komunis yang semakin besar, turut memberikan ancaman bagi Jepang. Melihat kondisi global yang memanas akibat Perang Dingin, Jepang mulai membangun alat pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman bangsa lain. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dilaksanakan. Melihat kondisi Jepang setelah mengalami

kekalahan dalam Perang Dunia II, justru mampu bangkit kembali dalam waktu relatif singkat. Negara-negara lain seperti Jerman dan Italia selaku negara yang kalah dalam Perang Dunia II, mengalami masa-masa sulit berkepanjangan dan membutuhkan waktu lama untuk bangkit kembali.

#### **Permasalahan yang di bahas adalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong kebangkitan Jepang pasca pendudukan Amerika Serikat 1952-1964?
2. Bagaimanakah usaha Jepang untuk kebangkitan negaranya setelah memperoleh kembali kedaulatan tahun 1952-1964?
3. Bagaimanakah hasil yang dicapai Jepang pada masa kebangkitan?

#### **Tujuan penelitian ini adalah:**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan faktor-faktor pendorong lahirnya kebangkitan Jepang setelah pendudukan Amerika Serikat.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan usaha Jepang untuk kebangkitan negaranya setelah memperoleh kembali kedaulatan tahun 1952-1964.
3. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan hasil yang dicapai Jepang pada masa kebangkitan.

#### **Manfaat penelitian ini adalah:**

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan berkaitan dengan

Sejarah Asia Timur secara umum dan sejarah Jepang pada khususnya.

2. Bagi mahasiswa Prodi Sejarah dapat menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah kebangkitan Jepang setelah mengalami masa pendudukan Amerika Serikat dan juga dapat menjadi inspirasi bagi calon guru sejarah untuk dapat belajar dari proses kemajuan dari negara Jepang.
3. Bagi FKIP Universitas Jember, dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian yang selanjutnya penelitian ini akan menambah koleksi perpustakaan Universitas Jember.
4. Bagi Masyarakat umum, dapat memberikan informasi dalam rangka meningkatkan inovasi untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dalam sektor industri dan teknologi, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain seperti Jepang.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985 : 32). Metode sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahap heuristik adalah kegiatan untuk mencari, menemukan, serta menemukan jejak sejarah. Langkah heuristik dilaksanakan dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sumber primer berupa buku yang ditulis oleh orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah pada masa kebangkitan Jepang, sedangkan sumber sekunder adalah buku penunjang yang merupakan buku tambahan yang menunjang sumber primer.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu: (1) *Japan Past and Present* (1969) dan *Japan Tradition and Transformation* (1978) karya Edwin O. Reischauer. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: (1) *Jepang Sepanjang Masa* (1961) karya Nio Joe Lan, (2) *Manajemen dan Kewirausahaan Jepang* (1985) oleh B.N Marbun, (3) *Mengenal Jepang* (1981) karya Ajib Rosidi; (4) *Pedang dan Sempoa "Suatu Analisa Kultural Perasaan Kepribadian Orang Jepang"* (1979) karya Mattulada, (5) *Belajar Dari Jepang "Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup"* (1981) karya Sayidiman Suryohadiprodo, (6) *Sedjarah Djepang* (1963) karya A. Dasuki.

Tahap kedua adalah Kritik. Kritik merupakan usaha untuk menilai, menguji atau menyeleksi sumber-sumber yang telah didapatkan. Sumber-sumber tersebut diseleksi untuk mendapatkan keabsahan sumber guna mendukung penulisan peristiwa sejarah. Tahap kritik dalam penelitian ini dilakukan secara intern dan ekstern.

Kritik intern merupakan pembuktian bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber dapat dipercaya. Kritik intern bertujuan untuk meneliti tingkat kebenaran data dari sumber yang digunakan. Sedangkan kritik ekstern untuk memperoleh keyakinan bahwa penelitian telah dilaksanakan dengan menggunakan data yang tepat, untuk itu perlu ditegaskan dengan jelas antara penulis buku dan latar belakang, judul buku, dan tahun penerbitan.

Hasil dari kritik intern dan ekstern terdapat sumber primer dan sumber skunder yang lebih valid. Sumber primer yang dianggap valid dan relevan dalam penelitian ini diantaranya: (1) *Japan Past and Present* (1969) dan *Japan Tradition and Transformation* (1978) karya Edwin O. Reischauer. Sumber skunder yang dianggap valid dan relevan dalam penelitian ini diantaranya: (1) *Jepang Sepanjang Masa* (1961) karya Nio Joe Lan, (2) *Mengenal Jepang* (1981) karya Ajib Rosidi; *Belajar Dari Jepang "Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan*

*Hidup"* (1981) karya Sayidiman Suryohadiprodo, (3) *Sedjarah Djepang* (1963) karya A. Dasuki.

Tahap ketiga adalah Interpretasi atau penafsiran. Tahap interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang diperoleh, sedangkan sintesis berarti menyatukan data-data sehingga ditemukan fakta sejarah (Abdurahman, 2007: 68). Fakta-fakta disusun secara kronologis dan membentuk fakta rasional dan faktual yang berdasarkan pada aspek pembahasan sebagai berikut: 1. faktor-faktor yang mendorong kebangkitan Jepang pasca pendudukan Amerika Serikat 1952-1964; 2. usaha Jepang untuk kebangkitan negaranya setelah memperoleh kembali kedaulatan tahun 1952-1964; 3. hasil yang dicapai Jepang pada masa kebangkitan.

Tahap keempat adalah historiografi. Tahap historiografi meliputi cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 2007: 76). Pada tahap historiografi, peneliti berusaha merangkai fakta sejarah yang didapat dari ketiga langkah di atas dan berusaha merekonstruksi imajinasi ilmiah yakni dengan penulisan fakta sejarah menjadi kisah sejarah sehingga menjadi kronologis, logis, dan sistematis.

Penyajian dari hasil penelitian adalah penyusunan kisah sejarah dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi secara sistematis adalah: Bab 1. pendahuluan yang berisikan latar belakang; penegasan pengertian judul, ruang lingkup penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian. Bab 2. kajian pustaka yang berisi uraian tentang hasil review penelitian terdahulu dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan dan teori yang digunakan penulis untuk membedah objek studi yang dijadikan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik dan teori pertumbuhan W.W Rostow sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab 1. Bab 3. metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik; heuristik; kritik (verifikasi); interpretasi; dan historiografi (penulisan)

yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 4. memaparkan faktor-faktor pendorong kebangkitan Jepang untuk membangun negaranya setelah mengalami kehancuran pada akhir perang Pasifik antara tahun 1952-1964. Bab 5. memaparkan usaha Jepang untuk kebangkitan negaranya setelah memperoleh kembali kedaulatan tahun 1952-1964. Bab 6. mendeskripsikan hasil yang dicapai Jepang pada masa kebangkitan. Bab 7. mendeskripsikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang kebangkitan Jepang pasca pendudukan Amerika Serikat tahun 1952-1964.

#### 1. Faktor Pendorong Kebangkitan Jepang Pasca Pendudukan Amerika Serikat Tahun 1952-1964

Faktor pendorong kebangkitan Jepang tahun 1952-1964 dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

##### 1.1 Faktor Intern

###### a. Karakteristik Sosial Budaya Bangsa Jepang

Bangsa Jepang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karakter bangsa Jepang mulai tertanam sejak pelaksanaan program isolasi yang dilakukan oleh Keshogunan Tokugawa. Selama kurang lebih 250 tahun masa isolasi, masyarakat Jepang mulai membentuk karakter untuk pantang menyerah dalam menghadapi persoalan dan tetap memegang nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari (Suryohadiprojo, 1987: 41).

Bangsa Jepang sangat menghargai peranan kelompok dalam masyarakat. Penghargaan terhadap kelompok menjadi lebih dominan dari pada penghargaan terhadap individu. Konsep demikian juga berlaku dalam kehidupan berumah tangga di Jepang. Fungsi anggota di dalam kelompok tidak ditentukan secara tegas, hal ini dikarenakan ketegasan tersebut berada pada tujuan dan fungsi dari kelompok. Oleh sebab itu, seorang anggota

kelompok dapat diminta untuk mengerjakan apapun yang dibutuhkan oleh kelompok (Suryohadiprojo, 1987: 43).

Menurut Agung (2012: 124-130), karakter bangsa Jepang yang menonjol dan berpengaruh kuat terhadap proses kebangkitannya menjadi negara besar antara lain; (a). sikap pantang menyerah, (b) kerja keras, (c). loyalitas, (d). budaya malu, (e). inovatif.

###### b. Nilai-Nilai Luhur Bangsa Jepang

Karakteristik bangsa Jepang juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur dan tradisi dinegaranya. Nilai-nilai luhur dari para samurai (*bushido*) masih tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. *Bushido* merupakan suatu kode etik kaum samurai yang tumbuh sejak munculnya samurai di Jepang. Semangat *bushido* bersumber pada perpaduan antara nilai-nilai agama Budha khususnya ajaran *zen* dan *Shinto* (Marbun, 1985: 65). Semangat *bushido* mengharuskan seorang samurai untuk senantiasa memperhatikan: (1) kejujuran, (2) keberanian, (3) kemurahan hati, (4) kesopanan, (5) kesungguhan, (6) kehormatan atau harga diri, dan (7) kesetiaan (Suryohadiprojo, 1987: 49). Nilai-nilai *bushido* juga dianut oleh seluruh masyarakat Jepang.

##### 1.2 Faktor Ekstern

###### a. Pendudukan Amerika Serikat

Amerika Serikat selama di Jepang melaksanakan kebijakan (1) Demiliterisasi, (2) Demokratisasi, dan (3) Pembaharuan Ekonomi (Hayes, 1994: 39-42).

###### (1). Kebijakan Demiliterisasi (Penghancuran Militer)

Demiliterisasi merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah kekuatan militer dalam suatu negara. Alasan SCAP menerapkan program demiliterisasi adalah untuk menjamin bahwa kekuatan militer Jepang tidak akan pernah mengancam keamanan dan perdamaian dunia (Reischauer, & Craig, 1990: 280). Pada tahun 1946, sekitar 4.335.500 tentara Jepang yang berada di negeri induk dan 3.527.000 tentara Jepang di daerah jajahan berada dalam pengawasan SCAP. Terdapat 27 organisasi

ultranasionalis yang terlarang dan tercatat 29 nama-nama mantan petinggi pemerintahan dan pos militer Jepang.

## (2). Demokratisasi

Kebijakan demokratisasi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program demiliterisasi. Program demokratisasi bertujuan untuk mengarahkan Jepang menjadi negara yang demokratis. Program demokratisasi Jepang didasari oleh Konstitusi Showa yang dibuat pada 15 Desember 1945. Konstitusi baru ini memiliki 3 prinsip dasar yaitu penghormatan terhadap hak asasi warga negara, persamaan hak bagi wanita, dan penghapusan sistem pemerintahan yang otoriter (Hane, & Perez. 2008: 371).

Konstitusi Showa diumumkan pada tanggal 6 Maret 1946, menggantikan konstitusi Meiji yang digunakan Jepang era Kekaisaran. *Diet* dijadikan sebagai badan pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak membuat Undang-Undang Dasar dan berhak memilih Perdana Menteri. Pemilihan Umum pertama sejak Perang Dunia II dilaksanakan pada 10 April 1948. Pemilihan umum ini diikuti 7 partai politik yakni Partai Liberal Demokrat, Partai Sosial Jepang, Partai Pemerintahan Bersih, Partai Sosial Demokrat, Partai Komunis Jepang, Himpunan Liberal Baru, dan Partai Gabungan Demokrat Sosial (Mas'ood, & Andrews, 1995: 214). Pada pemilihan umum tahun 1948 dimenangkan oleh Yoshida Shigeru dari Partai Liberal.

## (3). Pembaharuan Ekonomi

Program pembaharuan ekonomi Jepang, mencakup tiga aspek utama yaitu (a) pembubaran *zaibatsu*, (b) reformasi pertanian, dan (c) reformasi tenaga kerja (Hayes, 1994: 38-94).

### (a) pembubaran *zaibatsu*

*Zaibatsu* merupakan kelompok perusahaan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga kaya atau *holding company*. Anggota *zaibatsu* saling bekerjasama untuk memegang, menguasai, dan menentukan kepemimpinan perusahaan-perusahaan di Jepang. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *zaibatsu* antara lain; Mitsui,

Mitsubishi, Sumitomo, dan Yasuda (Mattulada, 1979:155). *Zaibatsu* memberikan bantuan keuangan sebesar 5,75 milyar Yen kepada pemerintah Jepang untuk mempertahankan militernya di daerah jajahan. Atas dasar bukti pemberian dukungan kepada pihak militer tersebut, Amerika Serikat dan sekutunya menginginkan adanya pembubaran *zaibatsu* di Jepang.

### (b) reformasi pertanian

Amerika Serikat berpendapat *Land Reform* sangat diperlukan setelah melihat adanya praktik feodalisme dan munculnya komunisme dari kelas pekerja dan petani miskin. Tujuan pelaksanaan kebijakan *Land Reform* yaitu untuk pemindahan kepemilikan tanah dari golongan bangsawan yang feodal kepada petani. Pemakaian lahan untuk keperluan di luar industri pertanian dibatasi 1 *cho*. Tuan tanah di daerah setempat hanya boleh memiliki lahan seluas 1 *cho*, sedangkan tuan tanah dari luar daerah tidak diperbolehkan memiliki tanah. Lahan yang dapat disewakan dibatasi 3 *cho*.

### (c) reformasi tenaga kerja

Undang-Undang Serikat Pekerja (*Rodo Kuimiaiho/Trade Union Law*) sebagai landasan utama untuk mengatasi permasalahan terkait ketenagakerjaan di Jepang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ditentukan pembatasan jam kerja menjadi 8 jam dalam satu hari dan 48 jam dalam satu minggu. Pada tahun 1950 jumlah jam kerja buruh mencapai rata-rata 3000 jam pertahun, sedangkan di negara-negara Barat hanya 1900-2100 jam kerja pertahun. Pada tahun 1952 pemerintah menurunkan jam kerja menjadi 2146 pertahun (Suryohadiprojo, 1987:89).

## b. Pecahnya Perang Korea

Perang Korea dimulai dengan penyerangan Korea Utara atas Korea Selatan di Kota Incheon. Amerika Serikat yang terlibat langsung dalam Perang Korea, memanfaatkan Jepang sebagai pangkalan logistik pasukan militernya di kawasan Pasifik. Perusahaan-perusahaan yang membangun industri tertentu untuk kepentingan tertentu disebut *zaikai*. Terjadinya Perang Korea

menyebabkan *zaikai* mendapat program permintaan khusus (*tokuju*) dari Amerika Serikat (Andressen, 2002: 125).

Perkembangan produksi *zaikai* dapat dilihat dari kenaikan jumlah *tokuju* yang mampu dipenuhi oleh Jepang dari tahun 1950 (63 juta \$ AS), 1951 (624 juta \$ AS), dan 1952 (788 juta \$ AS). Meskipun terbebani oleh besarnya jumlah *tokuju*, *zaikai* Jepang memperoleh kenaikan pertumbuhan produksi industri dari tahun 1950 (73,6 juta \$ AS), tahun 1951 (101,7 juta \$ AS), dan 1952 (108,9 juta \$ AS) (Dorn-Busch, dalam Topan, 2013: 57-58). Konflik yang terjadi di Korea berdampak pada perubahan kebijakan ekonomi di Jepang.

Perang Korea yang terjadi pada 25 Juni 1950, menyebabkan munculnya *keiretsu* di Jepang. *Keiretsu* sebagai wajah baru dari *zaibatsu* tetap mempertahankan pola kekeluargaan dalam struktur kekuasaan, hanya saja sistemnya lebih longgar. Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan munculnya industri-industri yang mendukung kebangkitan ekonomi Jepang (Soepriyatno, 2008: 40).

## **2. Usaha Jepang Untuk Kebangkitan Negaranya Setelah Memeroleh Kemerdekaan**

Usaha Jepang difokuskan pada bidang ekonomi, politik dan pertahanan. Usaha-usaha Jepang tersebut antara lain.

### **2.1 Bidang Ekonomi**

#### **a. Sektor Industri dan Pertanian**

Pemerintah Jepang memberikan dukungan yang besar untuk melindungi sektor industri yang sudah ada, dan memberikan kemudahan dalam mendirikan industri yang baru. Kondisi demikian memicu pertumbuhan industri Jepang. Pertumbuhan industri Jepang hampir terus menerus mengalami kecepatan di setiap tahunnya.

Pada tahun 1948 produksi hanya mencapai 40 % dari 1.937 angka, tetapi hasil tersebut adalah akhir masa sulit yang dihadapi Jepang. Pada tahun 1950 indeks hasil produksi adalah 84, pada tahun 1953 naik menjadi 155.

Meski mengalami sedikit penurunan pada tahun 1954, indeks hasil produksi Jepang mengalami peningkatan kembali sebesar 262 poin pada tahun 1957, kemudian melonjak menjadi 325 poin pada tahun 1959 dan 410 poin pada tahun 1960. Pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1960 ekonomi Jepang mencapai tingkat pertumbuhan riil 13% dan naik 2% setiap tahunnya, hal ini disertai oleh kenaikan konsumsi individu 12% (Beasley, 1963: 299).

Pada tahun 1950 sampai 1960, pemerintah Jepang secara intensif melakukan perlindungan terhadap industri pertaniannya. Petani mulai menggunakan pupuk, benih dan mesin yang baru untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Jepang. Pada tahun 1955, pertanian Jepang telah mengalami perkembangan yang optimal. Hasil pertanian Jepang pada tahun 1955 sebagai berikut; 666.000.000 karung padi, 19.000.000 karung kacang kedelai, 10.680.000 karung gandum, 3.430.000 karung jagung, 2.884.000 karung kentang, 6.000.000 karung kentang manis. Total keseluruhan hasil pertanian tahun 1955 meningkat 8,6 % dari tahun 1954. Sektor pertanian Jepang menghasilkan 84 milyar dollar pada tahun 1955 (Webb, 1960: 63). Peningkatan hasil pertanian dapat menurunkan impor kebutuhan pangan masyarakat Jepang.

#### **b. Manajemen Jepang**

Terdiri dari manajemen produksi dan manajemen perdagangan. Adapun penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut.

##### **(1) Manajemen Produksi**

Departemen Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) dibentuk untuk memberikan bimbingan dan jaminan di sektor perdagangan Jepang. Pemerintah Jepang juga membentuk departemen lain yang memainkan peran penting seperti kementerian Keuangan, Transportasi, Konstruksi, Pos dan Telekomunikasi, dan Badan Perencanaan Ekonomi (Stockwin, 1984: 4).

Keberhasilan MITI dalam mengembangkan produktifitas Jepang didukung oleh adanya kondisi sebagai berikut: (a) sektor swasta bersedia menerima kewenangan MITI; (b) MITI dapat memaksa perusahaan-

perusahaan untuk melaksanakan kebijakannya; (c) MITI relatif bebas dari pengaruh politik; (d) MITI terdiri dari pejabat-pejabat yang memiliki karier dan berdedikasi tinggi. Langkah-langkah terencana dan berorientasi yang dilaksanakan MITI, berhasil memfokuskan arah dan tujuan ekonomi Jepang.

## (2). Menejemen Perdagangan

Amerika Serikat memberikan pembatasan khusus bagi Jepang dalam menjalin persahabatan dan perdagangan bebas dengan negara-negara komunis. Kondisi demikian tidak menguntungkan bagi industri Jepang yang tidak dapat mencukupi faktor-faktor produksi dari negaranya sendiri.

Perdana Menteri Jepang Kishi Nobusuke mengirimkan *goodwill* ke negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara untuk perbaikan hubungan (Beasley, 1963: 293). Pengiriman *goodwill* ke berbagai negara dilakukan untuk mendapatkan lisensi perjanjian antar negara yang saling menguntungkan. Perjanjian perdamaian dengan negara-negara tetangga menjadi urusan penting dalam kebijakan luar negeri Jepang.

## 2.2 Bidang Politik

Usaha-usaha Jepang di bidang politik yang terdiri dari kegiatan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Adapun penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut.

### a. Politik dalam Negeri.

Politik dalam negeri Jepang tidak dapat dipisahkan dari campur tangan Amerika Serikat. Sesuai dengan isi perjanjian *San Francisco* tanggal 8 September 1951, Amerika Serikat masih tetap menduduki wilayah Jepang dengan alasan melindungi dari ancaman pihak luar (Stockwin, 1984: 72-74). Sesuai dengan isi konstitusi tahun 1947, Jepang merupakan negara liberal yang patuh terhadap perdamaian internasional. Sistem pemerintahan dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu; eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Konstitusi 1947 juga membatasi kekuasaan Kaisar yang sebelumnya menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, hanya sebagai simbol persatuan Jepang.

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (Diet) lebih besar dibanding dengan Dewan Penasehat. Kekuasaan badan eksekutif terletak ditangan kabinet, yang secara bersama bertanggung jawab kepada Parlemen (Diet) (Departemen Luar Negeri Jepang. 1967: 19-20). Perdana Menteri Jepang periode 1948-1964 yaitu, (a) Yoshida Shigeru 1946-1954, (b) Hatoyama Ichiro 1955-1956, (c) Kishi Nobusuke 1957-1960, dan (d) Keda Hayato 1960-1964

### b. Kerjasama Luar Negeri.

Amerika Serikat juga membuka hubungan perdagangan Jepang. Amerika Serikat memimpin jalan negosiasi dalam sistem perdagangan yang lebih terbuka melalui *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) pada tahun 1947. *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) dapat mempermudah usaha Jepang untuk mengakses sejumlah teknologi baru dan transistor bahan baku baja dari negara-negara yang sepakat pada perjanjian tersebut.

Lahirnya perserikatan dengan Amerika Serikat menyebabkan munculnya efek negatif dari politik luar negeri Jepang. Jepang terpaksa untuk mengikuti keinginan Amerika Serikat dalam perjanjian pertahanan antar kedua negara tersebut. Efek negatif muncul dari negara-negara yang kurang suka adanya aliansi Jepang dan Amerika Serikat. Hubungan dengan negara-negara lain dimulai perlahan-lahan. Pada tahun 1953, Jepang mulai membangun kembali perdagangan dengan Republik Rakyat Cina (RRC), meskipun pada tingkat yang sangat rendah (Hall, 1962: 47-48). Perdagangan dengan Taiwan juga mulai dikembangkan oleh pemerintah Jepang.

Usaha Jepang untuk mengambil kembali daerah teritorialnya mendapat bantuan dari PBB. Pada Oktober 1956 mulai terjalin hubungan diplomatik dan penandatanganan pakta perdagangan antara Jepang dengan negara-negara liberal. Pada bulan Desember 1956 Jepang resmi masuk menjadi anggota PBB (Simandjuntak, 1991: 32). Diterimanya Jepang sebagai anggota PBB masih belum dapat menyelesaikan masalah dengan Uni Soviet. Perebutan status kepemilikan Kepulauan Kurile antara



Jepang dan Uni Soviet tetap berlangsung (Beasley, 1963: 299).

### 2.3 Bidang Pertahanan

Pada tahun 1950 Jepang hanya membangun Polisi Cadangan (*Keisatsu Yobitai*) sebanyak 75.000 personil (Alfian, 2010: 58). Pada tahun 1952, Jepang merubah Polisi Cadangan (*Keisatsu Yobitai*) menjadi National Safety Force (*Hoantai*) dan ditambah dengan Maritim Safety Agency (*Keibitai*). Pada tahun 1954, Jepang kembali merubah National Safety Force (*Hoantai*) menjadi Self Defence Force (SDF) dan membangun pasukan udara. Self Defence Force (SDF) dibagi menjadi tiga unit yaitu Ground Self Defence Force (*Rikujo Jietai*), Maritim Self Defence Force (*Kaijo Jietai*), dan Air Self Defence Force (*Koku Jietai*). Misi SDF berubah dari hanya menjaga pertahanan internal menjadi alat pertahanan dari gangguan internal dan eksternal (Kedutaan Besar Jepang, 1985: 44).

Perkembangan kekuatan personil militer Jepang meningkat seiring dengan perubahan Self Defence Force (SDF) menjadi National Safety Agency (*Hoancho*). Diawali dengan pembentukan polisi cadangan yang berjumlah 75.000 personil pada tahun 1950, kemudian meningkat menjadi 117.177 personil pada tahun 1953, dan meningkat kembali 156.834 pada tahun 1955. Pada tahun tersebut Jepang mulai menambah enam divisi angkatan darat yang berjumlah 130.000 pasukan bersenjata, pembentukan 16.000 pasukan angkatan laut yang dilengkapi dengan 69.000 ton bahan peledak, dan 6.700 angkatan udara (Webb, 1960: 45-46). Garis besar pertahanan nasional Jepang berpedoman pada politik dasar yang disahkan oleh Dewan Pertahanan Nasional dan Kabinet Jepang tanggal 20 Mei 1957.

## 3. Hasil Yang Dicapai Jepang Pada Masa Kebangkitan

Bidang-bidang yang menjadi fokus kajian meliputi bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertahanan, dan bidang sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

### 3.1 Bidang Ekonomi

Pola pertumbuhan ekonomi Jepang memperlihatkan adanya sebuah keberhasilan yang belum dapat dicapai oleh negara-negara lain (Soesastro, 1990: 62). Selama masa pendudukan Amerika Serikat, kondisi Jepang masih mengalami depresi dan inflasi. Keadaan demikian berubah setelah Jepang mengalami periode Kebangkitan nasional yang terjadi pada tahun 1960.

Hasil yang dicapai Jepang dalam masa kebangkitannya adalah bahwa Jepang bergabung dengan kelompok negara-negara industri utama dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 1964 (Soesastro, 1990: 139). Olimpiade ke-18 yang diadakan di Tokyo pada bulan Oktober tahun 1964, memberikan kejelasan bahwa status Jepang telah kembali menjadi negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jepang sering menyebut tahun 1964 sebagai Tahun Keemasan atau *Golden Years*. Hasil yang dicapai menjadikan Jepang sebagai negara yang memiliki perekonomian luar biasa. Ikeda Hayato yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang tahun 1960-1964, mengumumkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang kaya dan maju. Pendapatan per kapita Jepang pada tahun 1960 sebesar \$ 421 dan \$ 1.676 pada tahun 1970 (Bix, 2005: 667).

### 3.2 Bidang Politik

Hasil yang dicapai Jepang dibidang politik yaitu terciptanya politik akomodasi yang menguntungkan bagi pemerintahan Jepang modern. Politik akomodasi berisi tindakan penggabungan berbagai elemen politik yang terdapat dalam partai-partai politik di Jepang. Politik akomodasi dilaksanakan oleh partai-partai besar seperti Partai Liberal, Partai Demokrat, dan Partai Sosialis. Tindakan tersebut dilakukan untuk menstabilkan kondisi politik Jepang yang mengalami ketegangan akibat munculnya hubungan Amerika Serikat dan Jepang dalam bentuk perjanjian pertahanan tahun 1959 dan disetujui tahun 1960.

Pada tahun 1960, kondisi politik Jepang mengalami ketenangan dan gangguan dalam keseimbangan pemerintahan. Suara dari Partai Liberal Demokrat (LDP) masih menjadi kunci dalam sistem pemerintahan Jepang. Partai Liberal Demokrat (LDP) berusaha untuk memenangkan dukungan dari golongan oposisi dengan menekankan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Stockwin, 1984: 141-142). Partai Liberal Demokrat (LDP) mengubah taktik dalam Diet menjadi tempat berunding secara informal dengan partai-partai oposisi diberbagai permasalahan dan membuat perubahan keputusan untuk memperoleh dukungan. Golongan sayap kiri yang tergabung dalam Partai Sosialis Jepang merespon tindakan Partai Liberal Demokrat (LDP) dengan konfrontasi politik ditempat kerja serta isu-isu internasional. Hasilnya adalah politik pertumbuhan baru yang ditandai dengan adanya tindakan akomodasi dan kompromi antar golongan-golongan dalam politik.

### 3.3 Bidang Pertahanan

Hasil yang dicapai Jepang dalam bidang militer yaitu terbentuknya perangkat pertahanan yang terorganisir dengan baik. Kekuatan militer dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari angkatan darat (*Ground Self Defence Force*), angkatan laut (*Maritim Self Defence Force*), dan angkatan udara (*Air Self Defence Force*). Pada tahun 1954 Jepang membentuk badan *National Safety Agency* (*Hoancho*), untuk mengkoordinir dari setiap angkatan bersenjata yang dimiliki (Alfian, 2010: 57).

Pada tahun 1958, sistem pertahanan Jepang terdiri dari (a) Angkatan Darat: memiliki 160.000 tentara dan ditambah 9.500 tentara cadangan, serta 11.916 pegawai sipil, (b) Angkatan Laut: memiliki 32.145 tentara, 1.916 pegawai sipil, serta memiliki kapal berjumlah 437 yang membawa bahan peledak hingga 112.006 ton dan 109 pesawat terbang dengan bermacam tipe, (c) Angkatan Udara: memiliki 19.925 tentara, 2.722 pegawai sipil, 798 pesawat terbang, 269 pesawat pemburu bertipe Jet Fe 86 Fe, 35 pesawat pengangkut bertipe C-46 dan 201 pelatih

Jet T33. Rencana tiga tahun yang dilaksanakan pada tahun 1958-1960, Jepang akan kembali memperkuat pertahanannya. Angkatan Darat Jepang memiliki 180.000 tentara, Angkatan Laut memiliki kapal induk pengangkut dengan kapasitas 124.000 ton bahan peledak, dan Angkatan Udara memiliki pesawat tambahan sebanyak 1.300 pesawat (Dasuki, 1963: 75). Selain meningkatkan jumlah personil angkatan militernya, Jepang juga meningkatkan kualitas persenjataan yang diproduksi sendiri.

Jepang memproduksi alat-alat militer yang canggih untuk menunjang minimnya personil yang dimiliki. Pada tahun 1960 Jepang berhasil menciptakan kapal induk dengan berat 1.732 ton, atau sama dengan 21,5% dari seluruh tonase kapal didunia. Jepang juga mampu membuat pesawat Jet dengan berbagai tipe antara lain tipe F-104 Js, tipe F8 Ds, tipe F8 Fs, dan pesawat Jet pemburu tipe F-86F Sabre dan tipe F104 J Super Starfighter (Departemen Luar Negeri Jepang, 1967: 47). Kemajuan industri Jepang untuk membuat alat-alat militer yang canggih memberikan dorongan bagi kecilnya jumlah tentara yang dimiliki.

### 3.4 Bidang Sosial Budaya

Kota-kota seperti Tokyo dan Osaka terus berkembang pada 1950-an dan 1960-an. Kemajuan tersebut sebagai daya tarik bagi masyarakat Jepang yang menginginkan kehidupan modern. Penduduk perkotaan Jepang naik dari 38 % pada tahun 1950 menjadi 50% pada tahun 1960 (Departemen Luar Negeri Jepang, 1967: 64). Pada tahun 1947-1949, angka kelahiran bayi mencapai 2,7 juta jiwa per tahun. Secara keseluruhan, antara tahun 1945 dan 1955 penduduk Jepang meningkat sebesar 18,6 juta jiwa.

Pendidikan di Jepang menghasilkan keluaran yang berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja. Lulusan sekolah menengah, baik laki-laki dan perempuan dapat mengambil pekerjaan sebagai anggota koperasi dengan prospek masa depan yang relatif terbatas. Tenaga kerja laki-laki lulusan SMA dapat masuk perusahaan sebagai

bagian terampil dalam produksi atau menempati posisi administrasi (Gordon, 2003: 253)

Meningkatnya pendapatan berdampak pada munculnya sikap konsumtif terhadap barang-barang pelengkap. Tingkat konsumsi meningkat hampir dua kali lipat antara tahun 1955 dan 1965. Jepang menjadi negara produsen, namun juga menjadi negara penabung dan pemboros (Huffman, 2010: 115). Pada tahun 1950-1955, Setiap rumah tangga rata-rata menyimpan 10 % dari pendapatan yang diterima setiap bulan. Rata-rata tabungan setiap keluarga mencapai 15 % pada 1960-1964.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa kebangkitan Jepang didorong oleh adanya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dari kebangkitan Jepang menjelaskan adanya kepribadian yang berdasar pada semangat *bushido* dalam pikiran masyarakat Jepang. Faktor ekstern dari kebangkitan Jepang menjelaskan peran dari Amerika Serikat dalam pelaksanaan program demiliterisasi, demokrasi, dan pembaharuan ekonomi, serta munculnya Perang Korea.

Usaha Jepang untuk menjadi negara maju difokuskan pada bidang ekonomi, politik, dan militer. Usaha Jepang dibidang ekonomi dapat dilihat dari adanya semangat untuk membangun industri dan pertanian yang modern serta menerapkan manajemen Jepang dalam mengelola industri dan perdagangan. Usaha untuk bangkit menjadi negara maju juga dilakukan dalam bidang politik. Politik dalam negeri dan politik luar negeri dilakukan sebagai proses menstabilkan pemerintahan Jepang sehingga pembangunan dengan cepat dapat dilakukan. Kekuatan militer Jepang dibagi menjadi tiga divisi yang didasarkan pada konsentrasi setiap bidangnya, yaitu angkatan darat, laut, dan udara. Untuk mengkoordinasikan setiap divisi, maka dibentuk badan pertahanan nasional.

Hasil yang dicapai Jepang selama masa kebangkitan dapat dilihat dari bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hasil dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari prosentase kemajuan Jepang. Pada tahun 1964 Jepang bersama dengan Amerika Serikat, Uni Soviet menjadi negara dengan GNP terbesar di dunia. Hasil dalam bidang politik yaitu terciptanya politik akomodasi sebagai bentuk keseimbangan dalam pemerintahan. Pemerintahan yang stabil memungkinkan pembangunan Jepang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Hasil dibidang pertahanan dapat dilihat dari terciptanya divisi militer yang terorganisir. Setiap divisi juga memiliki jumlah tentara dan alat pertahanan yang modern, sehingga keamanan dan ketentraman negara dapat tercapai. Hasil bidang sosial yaitu terciptanya masyarakat modern yang dinamis di Jepang pada tahun 1964. Masyarakat Jepang juga mulai bersikap konsumtif dan boros terhadap pembelian barang-barang mewah, hal ini menjadi tanda bahwa pada tahun 1964 masyarakat Jepang sudah memiliki standar hidup sebagai golongan menengah atas.

### 2. Saran

Berkaitan dengan simpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran:

a. Bagi mahasiswa sejarah

Sebagai calon guru sejarah, hendaknya selalu belajar tentang berbagai disiplin-disiplin ilmu yang mendukung terhadap kompetensi pembelajaran sehingga dapat menunjang profesionalismenya sebagai guru sejarah yang professional.

b. Bagi generasi penerus,

Sebagai generasi penerus bangsa, alangkah baiknya apabila meneladani sikap hidup bangsa Jepang. Cepatnya perkembangan ekonomi Jepang salah satu faktornya adalah penduduknya masih memegang nilai-nilai *Bushido* dalam kehidupan. Kiranya hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi generasi penerus untuk selalu mencintai dan melestarikan budayanya demi membangun bangsa.

## c. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya melihat kebangkitan Jepang sebagai ajang untuk memberikan motivasi dan edukasi. Semangat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang diorientasikan pada pembangunan ekonomi sangat menentukan perkembangan negara. Disisi lain, kebangkitan Jepang juga menjadi alat indikasi untuk tetap berhati-hati dalam menjalin hubungan antar negara, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Demikian beberapa saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat diambil segala manfaatnya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Teguh Prasetyo mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Handayani, M.M dan Bapak Dr. Sumardi, M.Hum yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran demi terselesainya jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman sekalian yang telah membantu penulis menjadi observer dan memberikan semangat untuk terselesainya penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- [1] Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- [2] Agung, L. 2012. *Sejarah Asia Timur 2*. Yogyakarta: Ombak.
- [3] Alfian, H. 2010. *Remiliterisasi Jepang Pasca Perang Dunia II*. Jember: Pena Salsabila.
- [4] Andressen, C. 2002. *A short history of Japan From Samurai to Sony*. Australia: Allen & Unwin.
- [5] Beasley, W. G. 1963. *The Modern History Of Japan*. New York: Frederick A. Praeger,
- [6] Dasuki, A. 1963. *Sedjarah Djepang Jilid 2*. Bandung: Balai Pendidikan Guru.
- [7] Departemen Luar Negeri Jepang. 1967. *Djepang Dewasa Ini*. Jakarta: Biro Urusan Penerangan dan Kebudayaan
- [8] Gordon, A. 2003 : *A Modern History Of Japan: From Tokugawa Times To The Present*. New York: Oxford University Press
- [9] Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1986. Jakarta: UI Press.
- [10] Hall, R.B. 1962. *Japan Industrial Power*. New York: VanNostrad Company, INC.
- [11] Hane, M & Perez, L.G. 2008. *Modern Japan A Historical Survey*. Amerika Serikat: Westview Press.
- [12] Hayes, L. D. 1994. *Introduction To Japanese Politics*. New York: Marlowe Company.
- [13] Kedutaan Besar Jepang. 1985. *Jepang Sebuah Pedoman Saku*. Jakarta: Foreign Prees Center Japan.
- [14] Mas'ood, M. & Andrews, C. M. 1995. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Prees.
- [15] Reischauer, E. O. 1969. *Japan Past and Present*. New York: Alfred A. Knopf.
- [16] Reischauer, E. O & Craig, A. M. 1990. *Tradition And Transformation*. Tokyo: Charles E Tuttle Company.
- [17] Rosidi, A. 1981. *Mengenal Jepang*. Jakarta: Pusat Kebudayaan Jepang Jakarta.
- [18] Soesastro, H. 1990. *Perkembangan Ekonomi Asia*. Jakarta: CSIS.
- [19] Stockwin, J.A.A. *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang*. Terjemahan oleh Nin Bakdi Sumanto. 1984. Yogyakarta: Gajah Mada University Prees.
- [20] Suryohadiprojo, S. 1987. *Belajar Dari Jepang (Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjuangan Hidup)*. Jakarta: UI-Press.
- [21] Tjeng, L.T. 1983. *Study Wilayah Pada Umumnya Asia Timur Pada Khususnya*. Bandung: Alumni.
- [22] Webb, H. 1960. *An Introduction to Japan*. New York: Columbia University prees.